



SIMPATIK
SIMPATIK, BERAKHLAK, MELAYANI, PROFESIONAL, AGIL,
TRANSPARAN, INDEPENDEN, DAN KRISDISAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025



Website
pn-palangkaraya.go.id



Facebook
Pengadilan Negeri Palangkaraya



Instagram
[pnpalangkaraya](https://www.instagram.com/pnpalangkaraya)



YouTube
PN Palangka Raya



PENGADUAN



WA Pengaduan
082324724933



Email Pengaduan
pengaduan@pn-palangkaraya.go.id

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Shalom...Om Swastiastu...Namo Budaya

Salam Kebajikan untuk kita semua

Adil Katalino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata.

(Baik Pada Sesama Manusia, berpandangan hidup seperti perkataan baik di surga, kehidupan manusia bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa).

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Laporan ini disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyelesaian laporan ini, namun demi kesempurnaan laporan ini, kami juga mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif, agar ke depannya lebih baik lagi.

Palangka Raya, 15 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya,



Ricky Fardinand, S.H., M.H.

PROFIL PIMPINAN

KETUA



WAKIL KETUA



PANITERA



SEKRETARIS



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TAHUN 2025



Piagam Penghargaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan yang telah berhasil melakukan pembangunan (ulang) SMAP dengan predikat B;



Penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas prestasi memperoleh Predikat SMAP Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PROFIL PIMPINAN	ii
PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TAHUN 2025	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN	
MUTU.....	5
A. Keadaan Perkara	5
B. Penyelesaian Perkara	7
- Perkara secara tepat waktu	7
- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	7
- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	8
- Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	8
- Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi	8
- Perkara perdata yang menggunakan E-Court.....	9
- Perkara pidana diselesaikan melalui e-Berpadu.....	9
- Layanan perkara pidana yang diselesaikan melalui e-Berpadu	10
C. Akreditasi Prioritas Nasional	10
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)	10
- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu.....	12
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	13
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	14
A. Mutasi	20
B. Promosi	21
C. Pensiun	21
D. Diklat	22

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI

INFORMASI	25
A. Pengelolaan Keuangan	25
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	28
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	40
1. Implementasi SIPP dilingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya	42
2. Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya	44
3. Implementasi e-Berpadu dilingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya	45

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....46

A. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	46
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	47
C. Inovasi Pelayanan Publik	52

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal.....	68
B. Evaluasi.....	71

BAB VII PENUTUP.....73

A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus, dan mengadili perkara, serta dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintahan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Palangkaraya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) **Fungsi Mengadili [*judicial power*]**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- b) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Para Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, serta seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.
- c) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- d) **Fungsi Lainnya :**
 - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
 - b. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Palangkaraya telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan saling mendukung satu sama lain yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan oleh seluruh bagian yang terkait, baik dari Aparatur Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Palangkaraya. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangkaraya dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Palangkaraya mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut : *"Terwujudnya Pengadilan Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Palangkaraya Kelas I A Yang Agung"*. Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Palangkaraya;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palangkaraya;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palangkaraya.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangkaraya merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Palangkaraya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun selanjutnya.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sedangkan Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palangkaraya, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya tingkat Keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Palangkaraya mencanangkan beberapa program. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Dukungan Manajemen

Pada tahun 2025 kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini yaitu:

- a. **Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, berupa:**
 1. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran;
 - Genset
 - AC Split 2 PK
 - AC Standing
 - Lemari Toga Hakim
 - Dispenser

b. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang terdiri dari:

- Layanan Perkantoran seperti Gaji dan Tunjangan;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam pelaksanaan program ini yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari:

a. Koordinasi.

- Kimwasmat

b. Perkara Hukum Perseorangan:

- Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Tengah;
- Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Tengah;
- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di Wilayah Tengah;

c. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan berupa :

- Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum.

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

A. KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

1. Tingkat Pertama

Perkara	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Sisa Perkara
Pidana Biasa	56	354	371	39
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Cepat	0	13	13	0
Pidana Anak	1	12	13	0
Pidana Pra Peradilan	0	10	9	1
Perkara Lalu Lintas	0	3368	3368	0
Perdata Gugatan	82	248	251	79
Perdata Permohonan	3	146	146	3
Perdata Gugatan Sederhana	2	10	9	3
Perlawanan/Bantahan	0	4	3	1
PHI	1	12	11	2
TIPIKOR	24	64	70	18
TOTAL	169	4241	4264	146

2. Tingkat Banding

Jenis Perkara	Permohonan Banding	Putus Banding
Gugatan	37	35
Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	2	1
Pidana Biasa	26	24

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

Tindak Pidana Korupsi	23	22
Pidana Anak	0	0
TOTAL	88	82

3. Tingkat Kasasi

Jenis Perkara	Permohonan Kasasi	Putus Kasasi
Gugatan	21	16
Permohonan	0	0
PHI	6	7
Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	0	0
Pidana Biasa	13	12
Tindak Pidana Korupsi	14	22
Pidana Anak	0	0
TOTAL	54	57

4. Tingkat Peninjauan Kembali

Jenis Perkara	Permohonan Kasasi	Putus Kasasi
Gugatan	7	7
PHI	0	0
Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet)	0	0
Pidana Biasa	6	1
Tindak Pidana Korupsi	8	9
TOTAL	21	17

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Penyelesaian perkara secara tepat waktu

Perkara	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
GUGATAN	251	164
PERMOHONAN	146	146
PHI	11	11
PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	3	3
GUGATAN SEDERHANA	9	9
PIDANA BIASA	371	371
PIDANA CEPAT	13	13
TINDAK PIDANA KORUPSI	70	70
PIDANA ANAK	13	13
PIDANA PRA PERADILAN	9	9
TOTAL	896	809

2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Perkara	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum
GUGATAN	251	65
PERMOHONAN	146	-
PHI	11	6
PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)	3	2
GUGATAN SEDERHANA	9	-
PIDANA BIASA	371	45
PIDANA CEPAT	13	-
TINDAK PIDANA KORUPSI	70	-
PIDANA ANAK	13	-
PIDANA PRA PERADILAN	9	-
TOTAL	896	118

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

3. Perkara Yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE					
TGL PENDAFTARAN	NOMOR PERKARA	ALUR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PUTUSAN	STATUS PUTUSAN
N I L					

4. Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi

Nomor Perkara	Mediator	Berhasil Dengan
206/Pdt.G/2024/PN Plk	H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.	Akta Perdamaian
51/Pdt.G/2025/PN Plk	NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H., M.H.	Akta Perdamaian
77/Pdt.G/2025/PN Plk	YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H	Akta Perdamaian
89/Pdt.G/2025/PN Plk	NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H., M.H.	Akta Perdamaian
113/Pdt.G/2025/PN Plk	SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.	Akta Perdamaian
145/Pdt.G/2025/PN Plk	SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.	Akta Perdamaian

5. Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi

No	No Diversi	Tanggal diterima Permohonan	a. Nomor Register Penyidik b. Nomor Register PU c. Nomor Perkara PN	Anak	Tanggal Kesepakatan	Tanggal Pelaksanaan Diversi
1	7/Pen.Div/2025/PN Plk	29 Okt. 2025	B/2387/X/RES.1.8./2025/Di treskrimum	34. MARPEL alias MARVEL	23 Okt. 2025	29 Okt. 2025
2	6/Pen.Div/2025/PN Plk	21 Jul. 2025	B/258/VII/RES.1.11/2025	33. MISNA	11 Jul. 2025	21 Jul. 2025
3	5/Pen.Div/2025	22 Mei. 2025	B/954/V/RES.1.8./2025/Dit	32. SEBRI alias	15 Mei. 2025	22 Mei. 2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

	25/PN Plk		reskrimum	PEPOY anak dari LIPER		
4	2/Pen.Div/20 25/PN Plk jo3/Pid.Sus- Anak/2025/P N Plk	17 Feb. 2025	3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Plk		24 Feb. 2025	24 Feb. 2025

6. Perkara Perdata yang Menggunakan E-Court

Perkara	Perkara Masuk	Perkara Diselesaikan melalui e-Court
Perdata Gugatan	248	248
Perdata Permohonan	146	146
Perdata Gugatan Sederhana	10	10
Perlawanan/Bantahan	4	4
PHI	12	12
Total	420	420

7. Perkara Pidana diselesaikan melalui e-Berpadu

Perkara	Perkara Masuk	Perkara diselesaikan melalui e-Berpadu
Pidana Biasa	354	354
Pidana Anak	12	12
Pidana Pra Peradilan	10	10
TIPIKOR	64	64
TOTAL	440	440

8. Layanan Perkara Pidana yang Diselesaikan melalui e-Berpadu

Bulan	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan
Januari	101	101
Februari	143	143
Maret	148	148
April	90	90
Mei	131	131
Juni	137	137
Juli	100	100
Agustus	100	100
September	100	100
Oktober	96	96
November	66	66
Desember	98	98
Total	1.310	1.310

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum (satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran)

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah **setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum**, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, yang memerlukan layanan hukum di Pengadilan.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Jumlah Alokasi Dana pada tahun 2025	Realisasi Anggaran tahun 2025	% Realisasi Anggaran
Rp. 44.000.000	Rp. 44.000.000	100%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN *TAHUN 2025*

Adapun jumlah layanan untuk Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Layanan
1	Desember	31 Layanan
2	November	35 Layanan
3	Oktober	31 Layanan
4	September	28 Layanan
5	Agustus	14 Layanan
6	Juli	36 Layanan
7	Juni	30 Layanan
8	Mei	18 Layanan
9	April	17 Layanan
10	Maret	21 Layanan
11	Februari	22 Layanan
12	Januari	18 Layanan
TOTAL		301 Layanan

2. Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pelayanan Terpadu sidang keliling meliputi:

- a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;

- b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- c. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025 tidak alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Jumlah Alokasi Dana pada tahun 2025	Realisasi Anggaran tahun 2025	% Realisasi Anggaran
NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

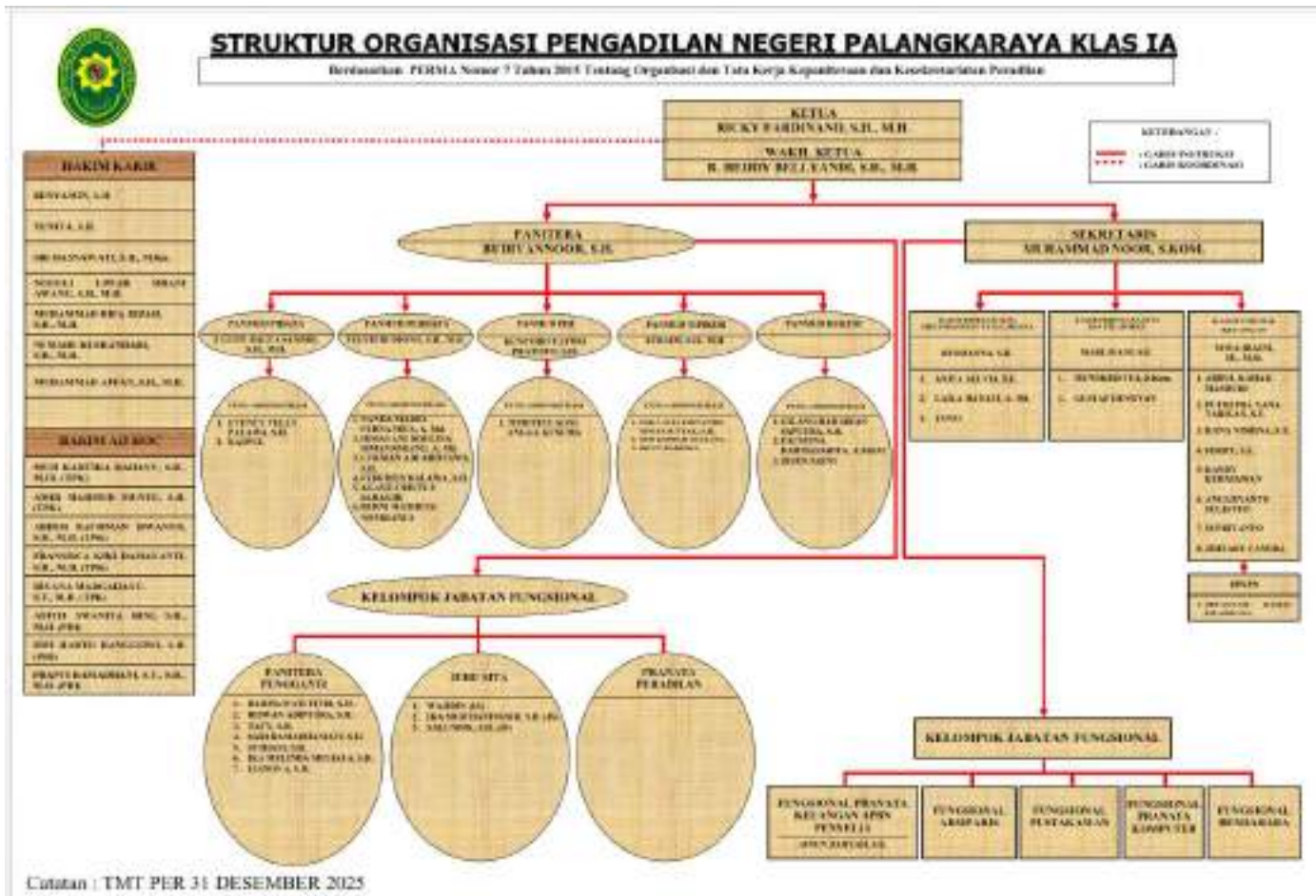
Salah satu bentuk untuk memenuhi pelayanan kepada publik adalah dengan memberi Hak atas biaya perkara cuma-cuma (prodeo) yang didasari oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dinyatakan bahwa prodeo adalah layanan berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis) bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi, yang dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan, termasuk biaya sidang dan semua layanan terkait dari awal hingga akhir proses hukum, dengan syarat utama melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen sosial lain yang relevan.

Pada tahun 2025 pada DIPA Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak ada alokasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

Jumlah Alokasi Dana pada tahun 2025	Realisasi Anggaran tahun 2025	% Realisasi Anggaran
NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Demikian pula dengan SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya yang merupakan salah satu instansi Pelayanan Publik maka kualitas dari Pelayanan amatlah penting, dibutuhkan dukungan SDM berkualitas yang menentukan keberhasilan dalam setiap pelayanan publik. Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas yang mendukung pelaksanaan Kinerja dan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, yaitu sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

Daftar Nama Hakim dan Pegawai (Per 31 Desember 2025)

No	Nama	NIP	Jabatan
1	RICKY FARDINAND, S.H., M.H.	197206111999031002	Ketua
2	R. HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H.	197308282000031002	Wakil Ketua
3	BENYAMIN, S.H.	196409211999031001	Hakim
4	YUNITA, S.H.	197706202002122003	Hakim
5	SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.	198012192003122002	Hakim
6	NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H., M.H.	197408062005021001	Hakim
7	MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.	198211142007041001	Hakim
8	NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H.	197609212008052001	Hakim
9	MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H.	197603242009041004	Hakim
10	ASTITI SWANITA RINI, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc PHI
11	DWI HARTO HANGGONO, S.H.	-	Hakim Ad Hoc PHI
12	PRAPTI RAMADHANI, S.T., S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc PHI
13	MUJI KARTIKA RAHAYU., S.H, M.Fil.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
14	AMIR MAHMUD MUNTE, S.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
15	ABDUR RACHMAN ISWANTO, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
16	FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
17	IRYANA MARGAHAYU, S.T., S.H.	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
18	BUDIYANNOOR, S.H.	197209171994031001	Panitera
19	MUHAMMAD NOOR, S.Kom.	197911282009121005	Sekretaris

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

20	I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H., M.H.	198406072008051001	Panitera Muda Pidana
21	TEGUH BUDIONO, S.H., M.H.	198208092008051001	Panitera Muda Perdata
22	EFRAIM, S.H., M.H.	197504232006041001	Panitera Muda Khusus Tipikor
23	KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H.	197101171995031001	Panitera Muda Khusus PHI
24	NOVA IRAINI, S.E., M.Si.	198411022009042007	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
25	RUSSIANNA, S.H.	196905161992032002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
26	MARLIYANI, S.E.	198507212009042003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
27	AINUN ZARYAH, S.E.	198712162009042005	Pranata Keuangan APBN Penyelia
28	RAHMAWATI FITRI, S.H.	198407242009042011	Panitera Pengganti
29	RISWAN ADIPUTRA, S.H.	198602172009041003	Panitera Pengganti
30	TATY, S.H.	198502162006042001	Panitera Pengganti
31	SARI RAMADHANIATI, S.H.	198406142009042011	Panitera Pengganti
32	IKA MELINDA MELIALA, S.H.	198710202011012014	Panitera Pengganti
33	JUMIATI, S.H.	198709252006042002	Panitera Pengganti
34	LIANOVA, S.H.	197503022009122001	Panitera Pengganti
35	WAJIDIN	196905251993031005	Jurusita
36	IKA MURTIANINGSIH, S.H.	198004102006042003	Jurusita
37	SALUNDIK, S.H.	197107052014081002	Jurusita

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

38	MEWIKRISTYA, S.Kom.	198511072009042010	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
39	ANITA SELVIA, S.E.	197807062011012003	Operator - Penata Layanan Operasional
40	PUTRI PRA YANA TARIGAN, S.E.	199109112022032012	Operator - Penata Layanan Operasional
41	EVENTY VELLY PALAWA, S.H.	199608072024052001	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
42	LUKMAN ADI ARIVIANO, S.H.	199603282024051001	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
43	GILANG RAHADIAN SAPUTRA, S.H.	200107012024051001	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
44	FEDERIUS HALAWA, S.H.	199310202025061008	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
45	ESKA JULI FIRNANDO SIMANJUNTAK, S.H.	199707292025061012	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
46	HANA NISRINA, S.T.	199509142025062007	Teknisi Sarana dan Prasarana
47	LAILA HAYATI, A.Md.	198410172009122001	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
48	NANDA MARIO FERNANDUS, A.Md.	199608012020121005	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
49	IRMAYANI ROULINA SIMANJORANG, A.Md.	199212052022032007	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
50	FAUSTINA RAHMASARITA, A.Md.A.	200208162025062010	Klerek - Dokumentalis Hukum
51	ABDUL KAHAR MASHURI	197211101993031002	Pengadministrasi Perkantoran
52	FERRY, S.E.	198009142025211025	Operator – Penata Layanan Operasional
53	SUPRIYANTO	197806262025211025	Operator Layanan Operasional
54	YOYO	198308152025211029	Operator Layanan Operasional
55	AGAVE CHRISTY JANUARTY SARAGIH	198701282025212024	Operator Layanan Operasional
56	JEJEN JAENI	198806142025211044	Operator Layanan Operasional
57	DEAN BARIZKA	199003302025211033	Operator Layanan Operasional

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

58	JIMI ADE CANDRA	199005132025211032	Operator Layanan Operasional
59	KASPUL	199007102025211052	Operator Layanan Operasional
60	TIMOTIUS AGNI ANGGA KUSUMA	199109132025211041	Operator Layanan Operasional
61	BERNI MATHEUS NOVRIANUS	199311252025211043	Operator Layanan Operasional
62	GUSTAF DENO VAN	199508152025211036	Operator Layanan Operasional
63	SITI KIFRAH SUCIANA	199805102025212035	Operator Layanan Operasional
64	DANDY KURNIAWAN	19990828202521101	Operator Layanan Operasional
65	ANGGRYANTO SULISTYO	199909082025211014	Operator Layanan Operasional
66	ZEFANYAH DAMAI FILADELFIA	-	PPNPN

Demikian keadaan personil SDM pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA dimana Tenaga Teknis/Non Teknis sebanyak 51 orang dan ditambah Hakim Adhoc 6 Orang dengan tenaga PPPK sebanyak 14 orang PPNPN sebanyak 1 Orang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 66 orang.

Komposisi SDM (Per 31 Desember 2025) pada pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	3	-	3
4	Pembina Tk. I	IV/b	3	2	5
5	Pembina	IV/a	4	2	6

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

6	Penata Tk. I	III/d	3	10	13
7	Penata	III/c	-	2	2
8	Penata Muda Tk. I	III/b	2	1	3
9	Penata Muda	III/a	4	3	7
10	Pengatur Tk. I	II/d	1	-	1
11	Pengatur	II/c	-	2	2
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Non Pangkat	-	12	3	15

2. Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	10	7	17
3	Sarjana (S-1)	7	21	28
4	Diploma (D-3)	1	3	4
5	SLTA/Sederajat	2	-	2

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

A. Mutasi

1. Data Mutasi Masuk Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan/Satker Lama	Jabatan/Satker Baru
1	Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H.	Hakim Yustisial/BUA Mahkamah Agung RI	Hakim/PN Palangkaraya
2	Muhammad Noor, S.Kom.	Sekretaris/PN Sampit	Sekretaris/PN Palangkaraya
3	Ni Made Kushandari, S.H., M.H.	Hakim/PN Singaraja	Hakim/PN Palangkaraya
4	Yunita, S.H.	Hakim/PN Tasikmalaya	Hakim/PN Palangkaraya
5	R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.	Ketua/PN Purworejo	Wakil Ketua/PN Palangkaraya
6	Budiyannoor, S.H.	Panitera/PN Tulung Agung	Panitera/PN Palangkaraya

2. Data Mutasi Keluar Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan/Satker Lama	Jabatan/Satker Baru
1	Muhammad Ramdes, S.H.	Wakil Ketua PN Palangkaraya	Ketua PN Tegal
2	Sumaryono, S.H., M.H.	Hakim PN Palangkaraya	Hakim PN Jakarta Barat
3	Erhammudin, S.H., M.H.	Hakim PN Palangkaraya	Hakim PN Balikpapan
4	Yudi Eka Putra, S.H., M.H.	Hakim PN Palangkaraya	Hakim PN Denpasar
5	Kusmat Tirta Sasmita, S.H.	Hakim Adhoc Tipikor PN Palangkaraya	Hakim Adhoc Tipikor PN Yogyakarta
6	Darjono Abadi, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor PN Palangkaraya	Hakim Adhoc Tipikor PN Bandung

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

7	Iis Siti Rochmah, S.H., M.H.	Hakim Adhoc Tipikor PN Palangkaraya	Hakim Adhoc Tipikor PN Bandung
8	Mansyah, S.H.	Panitera PN Palangkaraya	Panitera PN Sidoarjo
9	Mandes, S.Kom	Operator – Penata Layanan Operasional Subbag PTIP PN Plk	Kasubbag PTIP PN Kuala Kurun

B. Promosi

No.	Nama	Jabatan/Satker Lama	Jabatan/Satker Baru
1	Muhammad Ramdes, S.H.	Wakil Ketua PN Palangkaraya	Ketua PN Tegal
2	Sumaryono, S.H., M.H.	Hakim PN Palangkaraya	Hakim PN Jakarta Barat
3	Mansyah, S.H.	Panitera PN Palangkaraya	Panitera PN Sidoarjo
4	Mandes, S.Kom	Operator – Penata Layanan Operasional Subbag PTIP PN Plk	Kasubbag PTIP PN Kuala Kurun

C. Data Pensiun dan Pemberhentian

Data Pensiun dan pemberhentian selama Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	TMT Pensiun	Keterangan
1	Sri Widarti, S.Sos., S.H.	Sekretaris PN Palangkaraya	01 April 2025	Sudah dilaksanakan
2	Gusti Norliani	Panitera Pengganti	1 Juli 2025	Sudah dilaksanakan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat

Data Tenaga Teknis/Non Teknis yang mengikuti Diklat selama Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Kegiatan yang diikuti
1	Ricky Fardinand	Ketua	Laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024, Tanggal 17 – 20 Februari 2025 di Jakarta
2	Nova Iraini	Kasubbag Umum dan Keuangan	Stakeholder Day KPPN Palangkaraya, Tanggal 22 Januari 2025 di Palangkaraya
3	Lukman Adi Ariviano Eventy Velly Palawa Gilang Rahadian Saputra	CPNS	Pelatihan Dasar CPNS Gokongan III Tanggal 14 Maret 2025 di Megamendung
4	Nova Iraini Marliyani Mewikristya	Kasubbag Umum dan Keuangan Kasubbag PTIP Penelaah Teknis Kebijakan Subbagian PTIP	Ujian Dinas Elektronik (E-exam) Tahun 2025 Gel. 1 dan 2 Tanggal 25 Februari 2025 di Palangkaraya
5	Wakil Semua Hakim Pejabat Struktural	-	Workshop Isu Ketenagakerjaan pada Perkebunan Kelapa Sawit dan Teknik Komunikasi Tanggal 9 - 10 April 2025 di Palangkaraya
6	Mandes Ainun Zaryah	PPK Pranata Keuangan APBN Penyelia	One On One Meeting Evaluasi pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II Tahun 2025 Tanggal 19 - 20 Juni 2025 di Palangkaraya
7	Kuncoro Tatwo Pratisto	Panmud Hukum	Rapat Monev Pelayanan MI Pelayanan Publik Huma Betang Tanggal 10 Juli 2025 di Palangkaraya
8	Muji Kartika Rahayu Amir Mahmud Munte Abdur Rachman Iswanto Fransisca Kiki Damayanti Iryana Margahayu	Hakim Adhoc Tipikor	Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Tanggal 24 -26 Juli 2025 di Jakarta

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

9	Mansyah	Panitera	Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Calon Panitera Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Tanggal 7-8 Agustus 2025 di Jakarta
10	Mandes Ainun Zaryah	PPK Pranata Keuangan APBN Penyelia	One On One Meeting Evaluasi pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III Tahun 2025 Tanggal 11-12 Agustus 2025 di Palangkaraya
11	Abdur Rachman Iswanto Muji Kartika Rahayu	Hakim Adhoc Tipikor	Sosialisasi dalam rangka pengisian Kuesioner Penilaian Resiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian uang (NRA TPPU) tahun 2025 sebagai Responden Tanggal 27 Agustus di Palangkaraya
12	Teguh Budiono I Gusti Bagus Sandhi Kuncoro Tatwo Pratisto Efraim	Para Panitera Muda	Uji Substansi Panitera Muda Pengadilan Negeri Klas IA di Lingkungan Peradilan Umum secara Daring Tanggal 1 Oktober 2025
13	Nanda Mario Fernandus	Pengelola Perkara	Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung Tanggal 21 Oktober 2025 secara Daring
15	Mandes Ainun Zaryah	PPK Pranata Keuangan APBN Penyelia	One On One Meeting Evaluasi pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan IV Tahun 2025 Tanggal 20 November 2025 di Palangkaraya
16	Muhammad Affan	Hakim	Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II Gelombang II Tahun 2025 secara Daring Tanggal 24 November 2025
17	Federius Halawa, S.H. Hana Nisrina, S.T. Eska Juli Firnando .S.	CPNS	Seminar Rancangan Evaluasi Aktualisasi pada Kegiatan Pelatihan dasar CPNS Gel II Kerjasama dengan PPSPDM LEBTKE Tahun 2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

18	Para PPPK	PPPK	Orientasi PPPK Tahun 2025 batch I sd Batch X disatukan kerja masing-masing Tanggal 3-19 November 2025
19	Nanda Mario Fernandus Gilang Rahadian Saputra	Pengelola Perkara Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan dan Capacity Building bagi Petrugus layanan Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangkaraya Tanggal -1 November 2025
20	Eventy Velly Palawa	Analisis Perkara Peradilan	Ujian Dinas Elektronik (E-Exam) Penyesuaian Ijazah(S2) tahun 2025 Gel II Tahap I dan II Tanggal 3 Desember 2025 di Palangkaraya
21	Iryana Margahayu	Hakim Adhoc Tipikor	Pelatihan teknis Yudisial Filsafat Hukum, Agama, Militer dan tata Usaha Negara seluruh Indonesia Gel.2 Tanggal 1-5 Desember 2025 secara Daring
22	Muhammad Noor	Sekretaris	Kegiatan Administrasi Kesekretariatan Tanggal 11-13 Desember 2025 di Jakarta

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Terdapat 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2025, yaitu terdiri dari DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang telah di revisi sebanyak 13 (tiga belas) kali dan DIPA 03 (Dirjen Badan Peradilan Umum) yang telah di revisi sebanyak 9 (sembilan) kali. Adapun realisasi anggaran pada masing-masing DIPA yaitu sebagai berikut:

Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran 2025 DIPA 01.

NO.	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Persetase (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	13.488.751.000	13.410.717.999	99.42

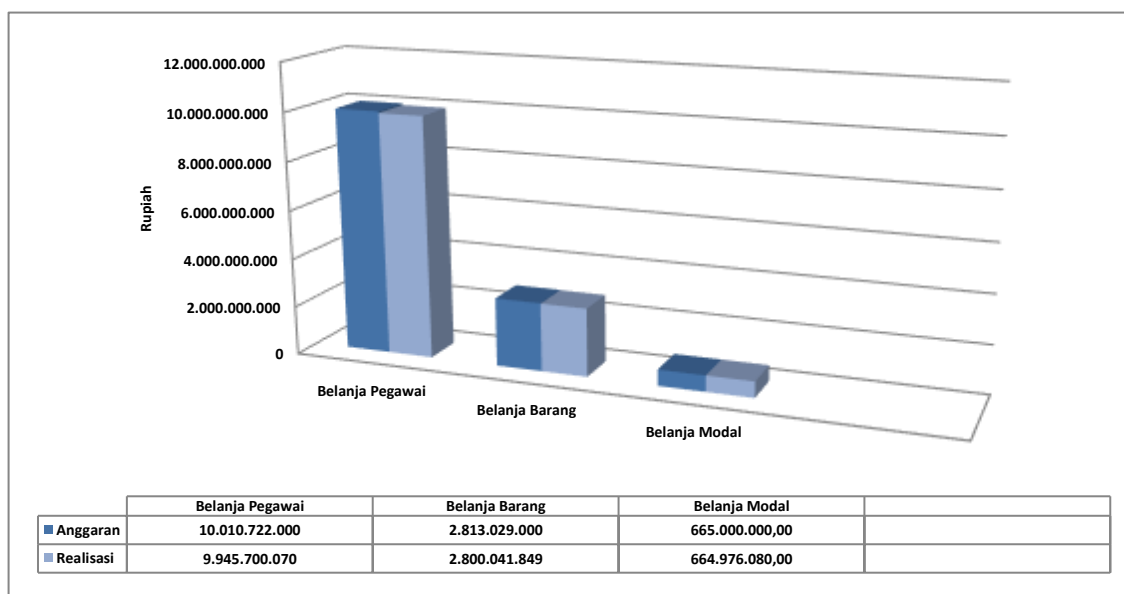
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2025 DIPA 01 adalah sebesar Rp. 13.410.717.999,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 99.42% dari anggaran senilai Rp. 13.488.751.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	10.010.722.000,-	9.945.700.070,-	99.35%
Belanja Barang	2.813.029.000,-	2.800.041.849,-	99.54%
Belanja Modal	665.000.000,-	664.976.080,-	100%
Total Belanja	13.488.751.000,-	13.410.717.999,-	99.42%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025



Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	2025	2024	Naik (Turun) Rp
Belanja Pegawai	9.945.700.070,-	9.493.123.001,-	452.577.069,-
Belanja Barang	2.800.041.849,-	2.880.094.027,-	-80.052.178,-
Belanja Modal	664.976.080,-	99.500.000,-	565.476.080,-
Total Belanja	13.410.717.999,-	12.472.717.028,-	938.000.971,-

Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran 2025 DIPA 03

NO.	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	220.884.000,-	219.724.500,-	99.48%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

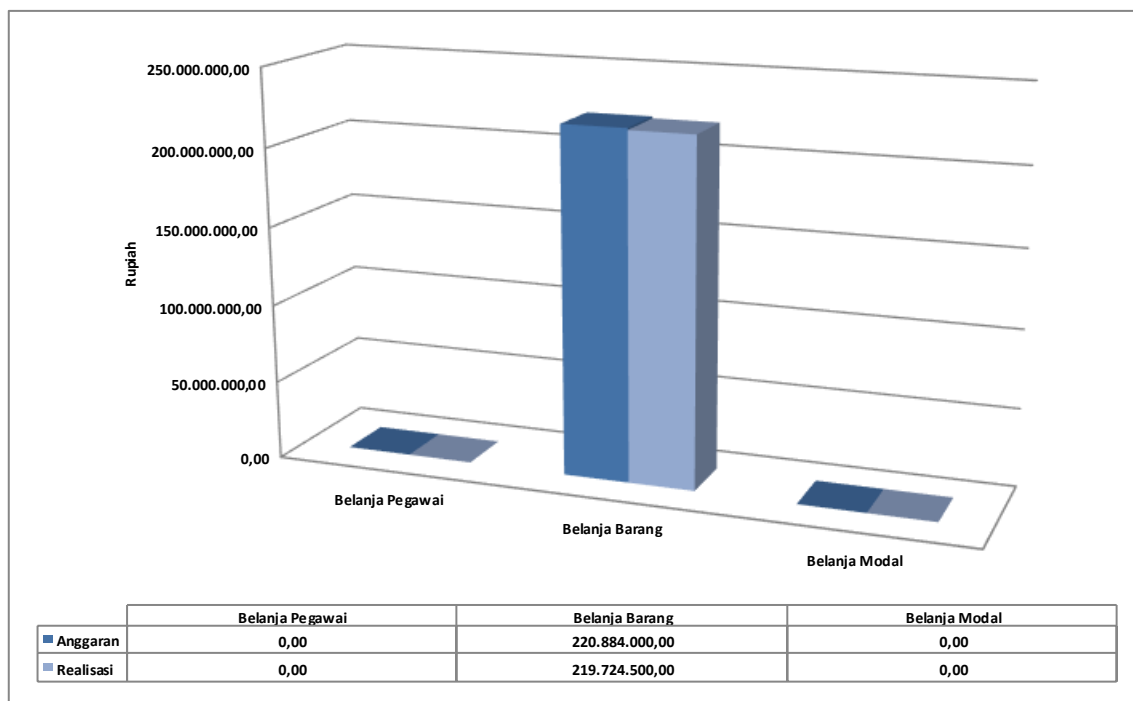
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2025 DIPA 03 adalah sebesar Rp. 219.724.500,- atau sebesar 99.48% dari anggaran senilai Rp. 220.884.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	TA 2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0.00
Belanja Barang	220.884.000,-	219.724.500,-	99.48%
Belanja Modal	0	0	0.00
Total Belanja	220.884.000,-	219.724.500,-	99.48%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)
			Rp
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	219.724.500,-	229.473.150,-	-9.748.650,-
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja	219.724.500,-	229.473.150,-	-9.748.650,-

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Negeri Palangkaraya mendapatkan anggaran Belanja Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Peralatan Fasilitas perkantoran yaitu Lemari Kayu, Kursi Besi/Metal, A.C. Split, Portable Air Conditioner, Dispenser dan Genset sebesar Rp. 540.716.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Selain itu Pengadilan Negeri Palangkaraya juga mendapatkan penambahan sarana dari Hibah Masuk dari Swadaya Rp. 33.825.000,- berupa A.C. Split, Portable Air Conditioner, Televisi dan Lemari Es. Adapun rincian Hibah masuk tersebut yaitu sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	A.C. Split	1 Unit	3.750.000	3.750.000
2	Portable Air Conditioner	1 Unit	14.475.000	14.475.000
3	Televisi	2 Unit	2.300.000	4.600.000
4.	Televisi	1 Unit	5.600.000	5.600.000
5.	Lemari Es	3 Unit	1.800.000	5.600.000
TOTAL				33.825.000

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN *TAHUN 2025*

Matrik sarana /prasarana pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung	2	Gedung Pengadilan Negeri Palangkaraya (Diponegoro) dan Pengadilan Negeri Tipikor (Seth Adji)
1.	Ruang Ketua	2	
2.	Ruang Wakil Ketua	2	
3.	Ruang Panitera	2	
4.	Ruang Sekretaris	1	
5.	Ruang Sidang	5	Ruang Sidang Elektronik = 2 Ruang sidang umum = 2 Ruang Sidang anak= 1
6.	Ruang Kepaniteraan	5	Pidana, Hukum, Perdata, PHI, Tipikor
7.	Ruang Panitera Pengganti	3	
8.	Ruang Tunggu Jaksa	2	
9.	Ruang Tunggu Penasihat Hukum	2	
10.	Ruang Mediasi	1	
11.	Ruang Posbakum	1	
12.	Ruang Kesekretariatan	3	Umum dan Keuangan, PTIP, Kepegawaian
13.	Ruang Server/ IT	2	
14.	Ruang Perpustakaan	1	
15.	Ruang Kesehatan	1	
16.	Mushola	1	
17.	Ruang Sidang Tipikor/ PHI	2	Ruang sidang elektronik = 1 Ruang sidang umum = 1
18.	Ruang Pertemuan/Media Center	2	
19.	Ruang Tamu Terbuka	2	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

20.	Ruang Pojok E-Court	1	
21.	Ruang Inzage	1	
22.	Ruang Tunggu Anak	1	
23.	Ruang Ramah Anak	2	
24.	Ruang Teleconference	1	
25.	Ruang Arsip	5	
26.	Ruang Tahanan	4	Ruang Tahanan Wanita = 2, Ruang Tahanan Laki-Laki= 2
27.	Ruang Hakim	4	

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Server	4 Unit	Kondisi Baik 4
2	Router	1 Unit	Kondisi Baik 1
3	Switch Hub	2 Unit	Kondisi Baik 2
4	Netware Interface External	6 Unit	Kondisi Baik 6
5	Rak Server	1 Unit	Kondisi Baik 1
6	P.C unit	70 Unit	Kondisi Baik 70
7	Laptop	24 Unit	Kondisi Baik 24
8	Peralatan Jaringan Lainnya	5 Unit	Kondisi Baik 5
9	Camera Digital	1 Unit	Kondisi Baik 1
10	Monitor	4 Unit	Kondisi Baik 4
11	Printer	23 Unit	Kondisi Baik 23
12	CCTV	17 Unit	Kondisi Baik 17
13	Mesin Absensi	3 Unit	Kondisi Baik 3

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

14	Sound System	1 Unit	Kondisi Baik 1
15	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13 Unit	Kondisi Baik 13
16	Pesawat Telephone	1 Unit	Kondisi Baik 1
17	Facsimile	1 Unit	Kondisi Baik 1
18	Internet	1 Unit	Kondisi Baik1
19	Hard Disk	2 Unit	Kondisi Baik 2
20	Speaker computer	6 Unit	Kondisi Baik 6
21	CPU	1 Unit	Kondisi Baik 1
22	Genset	3 Unit	Kondisi Baik 2 Rusak Berat 1
23	Lemari Besi/ Metal	10 Unit	Kondisi Baik 10
24	Lemari Kayu	77 Unit	Kondisi Baik 77
25	Rak Besi	103 Unit	Kondisi Baik 103
26	Filing Cabinet Besi	20 Unit	Kondisi Baik 20
27	Brankas	3 Unit	Kondisi Baik 3
28	Alat Pemotong Kertas	3 Unit	Kondisi Baik 3
29	Meja Kerja Kayu	148 Unit	Kondisi Baik 148
30	Kursi Besi/ Metal	207 Unit	Kondisi Baik 207
31	Kursi Kayu	105 Unit	Kondisi Baik 105
32	Sice	17 Unit	Kondisi Baik 17
33	Bangku Panjang Besi/ Metal	4 Unit	Kondisi Baik 4
34	Bangku Panjang Kayu	16 Unit	Kondisi Baik 16
35	Meja Rapat	6 Unit	Kondisi Baik 6

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

36	Meja Komputer	4 Unit	Kondisi Baik 4
37	AC Split	78 Unit	Kondisi Baik 78
38	Buffet	3 Unit	Kondisi Baik 3
39	LCD Projector/ Infocus	1 Unit	Kondisi Baik 1
40	Kotak Surat	5 Unit	Kondisi Baik 5
41	Papan Visual/ Papan Nama	29 Unit	Kondisi Baik 29
42	Teralis	1 Unit	Kondisi Baik 1
43	Perkakas Kantor Lainnya	4 Unit	Kondisi Baik 4
44	Meja Resepsonis	2 Unit	Kondisi Baik 2
45	Kursi Fiber Glas/ Plastik	75 Unit	Kondisi Baik 75
46	Gantungan Jas	1 Unit	Kondisi Baik 1
47	Jam Elektronik	7 Unit	Kondisi Baik 7
48	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1 Unit	Kondisi Baik 1
49	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	10 Unit	Kondisi Baik 10
50	Exhause Fan	3 Unit	Kondisi Baik 3
51	Treng Air/ Tandon Air	1 Unit	Kondisi Baik 1
52	Televisi	11 Unit	Kondisi Baik 11
53	Lambang Garuda Pancasila	5 Unit	Kondisi Baik 5
54	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	1 Unit	Kondisi Baik 1
55	Tiang Bendera	8 Unit	Kondisi Baik 8
56	Dispenser	8 Unit	Kondisi Baik 8
57	Palu Sidang	4 Unit	Kondisi Baik 4
58	Lambang Instansi	2 Unit	Kondisi Baik 2

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

59	Asbak Tinggi	6 Unit	Kondisi Baik 6
60	Bingkai Foto	1 Unit	Kondisi Baik 1
61	Audio Mixing Portable	3 Unit	Kondisi Baik 3
62	Alat Studio Lainnya	1 Unit	Kondisi Baik 1
63	Telephone (PABX)	20 Unit	Kondisi Baik 20
64	Charger	1 Unit	Kondisi Baik 1
65	Kursi Dorong	1 Unit	Kondisi Baik 1
66	TV Monitor	1 Unit	Kondisi Baik 1
67	Alat Pemadam Kebakaran	6 Unit	Kondisi Baik 6
68	Alat Press Kertas	1 Unit	Kondisi Baik 1
69	Tameng	5 Unit	Kondisi Baik 5
70	Komputer Jaringan Lainnya	1 Unit	Kondisi Baik 1
71	Peralatan Permainan Lainnya	1 Unit	Kondisi Baik 1
72	Piala	25 Unit	Kondisi Baik 25
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer	8 Unit	Kondisi Baik 8
74	Digital Led Running Text	1 Unit	Kondisi Baik 1
75	Camera Conference	3 Unit	Kondisi Baik 3
76	Tablet PC	1 Unit	Kondisi Baik 1
77	Mesin Barcode	1 Unit	Kondisi Baik 1
78	Mesin Antrian	2 Unit	Kondisi Baik 2
79	Loudspeaker	12 Unit	Kondisi Baik 12
80	Microphone	21 Unit	Kondisi Baik 21
81	Mic Conference	8 Unit	Kondisi Baik 8

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

82	Gordyin	3 Unit	Kondisi Baik 3
83	Bracket Standing Peralatan	1 Unit	Kondisi Baik 1
84	Audio Mixing Console	1 Unit	Kondisi Baik 1
85	LCD Monitor	3 Unit	Kondisi Baik 3
86	Termometer Mercury Suhu Badan	1 Unit	Kondisi Baik 1
87	Thermometer Gun	2 Unit	Kondisi Baik 2
89	Alat Kedokteran Umum Lainnya	4 Unit	Kondisi Baik 4
90	Walker Polding	3 Unit	Kondisi Baik 3
91	Buku Buta Warna	7 Unit	Kondisi Baik 7
92	Network Monitoring System	1 Unit	Kondisi Baik 1
93	Software Komputer	2 Unit	Kondisi Baik 2
94	Alat Kantor Lainnya	2 Unit	Kondisi Baik 2

Matrik Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Roda 4					
1.	New Mazda Sedan	2011	√			
2.	Toyota Vios	2006	√			
3.	Toyota Kijang	2001	√			
4.	Toyota Innova E	2006	√			
5.	Toyota Fortuner (Pinjam Pakai)	2019	√			
II	Roda 2					
6.	Honda Mega Pro	2005			√	Penghapusan
7.	Yamaha Jupiter MX	2006	√			

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

8.	Yamaha Jupiter MX	2006	√			
9.	Yamaha Jupiter Z	2005	√			
10.	Yamaha Jupiter MX	2007	√			
11.	Honda GL Max	2003			√	Penghapusan
12.	Honda GL Max	2003			√	Penghapusan
13.	Honda Kharisma/ Kharisma NF125D	2006				Hilang (Penghapusan)

Penjelasan dari tabel diatas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mobil dengan nomor polis KH 1228 AU; type sedan; merk New Mazda; tahun pembuatan 2010; nomor mesin ZY451710; nomor rangka MM6DE10Y1C0192620; nomor BPKB J00149039M; tahun perolehan 2011; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas operasional Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.
2. Mobil dengan nomor polis KH 1175 AU; type sedan; merk Toyota Vios; tahun pembuatan 2006; nomor mesin 1NZX490489; nomor rangka MR053HY4269036530; nomor BPKB E3461266G; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas operasional Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya.
3. Mobil dengan nomor polis KH 1357 AU; type station wagon; merk Toyota KKF 80 Long; tahun pembuatan 2001; nomor mesin 7K0425845; nomor rangka MHF11KF8010065874; nomor BPKB B0703018M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas operasional kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya.
4. Mobil dengan nomor polis KH 1095 TU; type mini bus; merk Kijang Inova E; tahun pembuatan 2006; nomor mesin 1TR6243360; nomor rangka MHFXW41G960016792; nomor BPKB E1044874M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai mobil dinas operasional Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya

5. Mobil dengan nomor polis KH 1883 AU; merk Toyota Fotuner 2.1 VRZ; tahun pembuatan 2019; nomor mesin 2GDC523439; nomor rangka MHFGB8GS2K0892547; nomor BPKB 006847535M; tahun perolehan 2022; tercatat sebagai barang Pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai 2252/SEK.W16.U1/RT7/XI/2025, 000.2.3.2/4384/Bag.um.IX/2025 pada tanggal 17 September 2025 dengan pengguna ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.
6. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3643 AY; type Honda Mega Pro tahun pembuatan 2005; nomor mesin KEHLE1139; nomor rangka MH1KEHIK164287; nomor BPKB D8616347M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dengan kondisi rusak berat dan sudah dilakukan penghapusan.
7. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3678 AY; type Yamaha Jupiter MX tahun pembuatan 2006; nomor mesin 1S7076374; nomor rangka MH31970016K075949; nomor BPKB D9091088M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palangkaraya.
8. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3680 AY; type Yamaha Jupiter MX tahun pembuatan 2006; nomor mesin 1S7076140; nomor rangka MH31970016K076092; nomor BPKB D9091089M; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Palangkaraya.
9. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3502 AY; type Yamaha Jupiter Z tahun pembuatan 2005; nomor mesin STP719432; nomor rangka MH3STP0065K472888; nomor BPKB D3169581M; tahun perolehan 2005; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya.

10. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 4557 AY; type Yamaha Jupiter MX tahun pembuatan 2007; nomor mesin E6404390M; nomor rangka MH31S70037K255091; nomor BPKB 1S7255113; tahun perolehan 2007; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan digunakan sebagai kendaraan dinas Operasional Kasub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Palangkaraya.
11. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 4388 AY; type Honda GL MX tahun pembuatan 2003; nomor mesin AUBEE1045005; nomor rangka MH1UABE1133K045321; nomor BPKB C7083800M; tahun perolehan 2003; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dengan kondisi rusak berat dan sudah dilakukan penghapusan.
12. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 4398 AY; type Honda GL MX tahun pembuatan 2003; nomor mesin AUBEE1045064; nomor rangka MH1UABE133K045271; nomor BPKB C7083807M; tahun perolehan 2003; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dengan kondisi rusak berat dan sudah dilakukan penghapusan.
13. Sepeda Motor dengan nomor polis KH 3644 AY; type Honda Kharisma tahun pembuatan 2005; nomor mesin JB22E1562962; nomor rangka MH1JB22135K564635; tahun perolehan 2006; tercatat atas nama Pengadilan Negeri Palangkaraya dan dengan kondisi hilang dan akan diusulkan penghapusan.

Matrik Rumah Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

3.	Rumah Dinas Hakim	6	√		√	Baik = 5 Rusak berat = 1 (mengalami kebakaran)
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-				Belum ada

Penjelasan dari table diatas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m², golongan I tipe B Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 2166 m². Sertifikat nomor 2701 tanggal 25 september 2002 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan Cilik Riwut No. 21 Palangka Raya Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.
2. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 120 m², golongan I tipe B Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 750 m². Sertifikat nomor 2849 tanggal 27 April 1977 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan Dahlia No. 4 Palangka Raya Kalimantan Tengah. Digunakan sebagai rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya.
3. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1200 m². Sertifikat nomor 33 tanggal 17 Mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan C. Bangas Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
4. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1200 m². Sertifikat nomor 35 tanggal 17 Mei 1980 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak dijalan G. Obos No. 7 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.

5. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1200 m². Sertifikat nomor 193 tanggal 06 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan L. Mangkurat No. 11 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
6. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1157 m². Sertifikat nomor 192 tanggal 08 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan L. Mangkurat No. 13 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
7. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1156 m². Sertifikat nomor 191 tanggal 08 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Untung Suropati No. 19 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini dalam keadaan rusak berat
8. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1156 m². Sertifikat nomor 194 tanggal 08 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terletak di jalan Untung Suropati No. 21 Palangka Raya Kalimantan Tengah dan saat ini digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya.
9. Satu unit rumah dinas dengan luas bangunan 70 m², golongan II tipe C Permanen berdiri diatas tanah dengan luas 1271 m². Sertifikat nomor 190 tanggal 08 November 2013 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung

Republik Indonesia yang terletak di Jalan Untung Suropati No. 23 Palangkaraya Kalimantan Tengah dan saat ini dalam keadaan kosong.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam Rangka terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Negeri Palangkaraya menempatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta organisasi modern berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu. Perangkat pendukung TI tersedia yakni:

Alamat Website dan SIPP	VERSI SIPP	Nama Provider Internet Dan Bandwidth	Model/Type Server	Fungsi Server
https://pn-palangkaraya.go.id https://sipp.pn-palangkaraya.go.id/	6.0.1	Fibernet 180 Mbps 1:1 (Dedicated)	✓ Fujitsu PRIMERGY RX 1330 M1 ✓ Fujitsu PRIMERGY TX 1330 M4	✓ SIPP, PTSP, MIS, Sinkronisasi, Data Cloud, Antrian sidang dan aplikasi lain-lain ✓ Backup Data SIPP dan MIS

Salah satu pemanfaatan Teknologi Informasi adalah diwajibkannya setiap Pengadilan mempunyai *website* termasuk Pengadilan Negeri Palangkaraya sendiri. Dalam era digitalisasi sekarang ini website mempunyai peran sangat penting, karena dengan adanya website akan tercipta transparansi segala kegiatan yang ada di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, khususnya Peradilan Umum. Melalui website keterbukaan informasi publik maupun keterbukaan pelayanan publik akan mudah diakses oleh masyarakat pengguna pengadilan.

Tampilan Website Pengadilan Negeri Palangkaraya yaitu sebagai berikut:



Gambar : Website Pengadilan Negeri Palangkaraya

Minimnya tenaga yang mempunyai keahlian di bidang TI, merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi, karena untuk masa yang akan datang Teknologi Informasi adalah sarana utama dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing aparat Pengadilan. Pengadilan Negeri Palangkaraya akan terus mendorong para pegawai untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan tentang Teknologi Informasi.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *e-Court* dan e-Berpadu adalah inovasi andalan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan administrasi perkara secara elektronik. **SIPP** adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. **Kedua** adalah ***e-Court*** yang merupakan sebuah instrumen Pengadilan yang terintegrasi dengan SIPP sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat

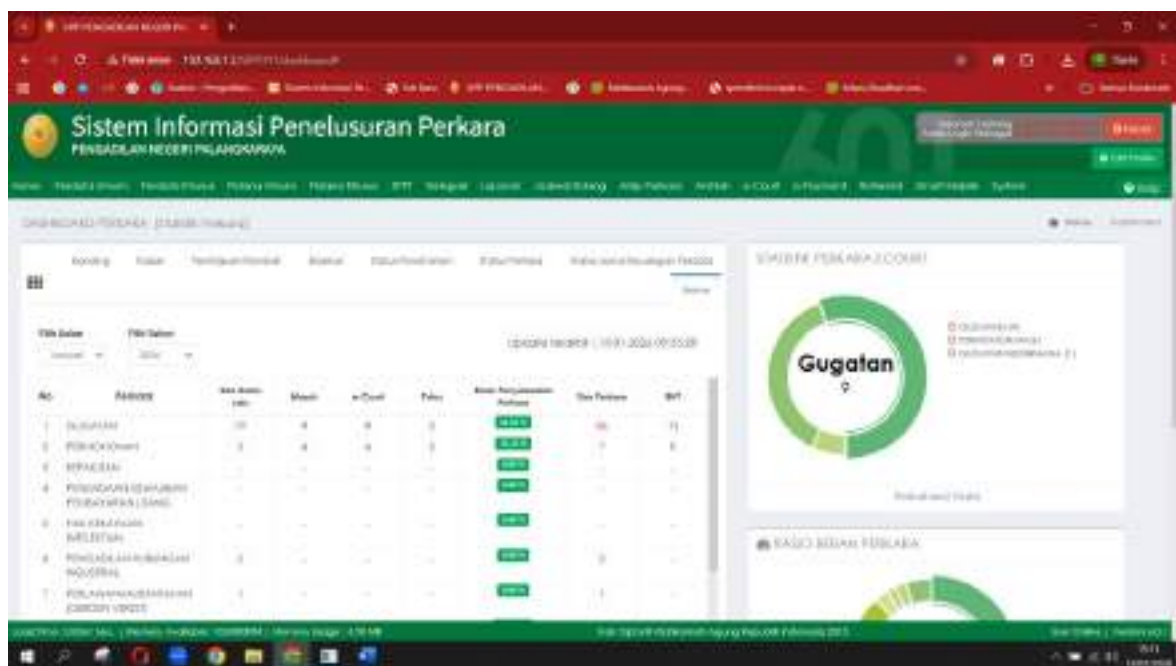
dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban), pemanggilan secara *online*, dan penyampaian salinan putusan secara *online*. Dengan aplikasi ini masyarakat melalui kuasanya akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Ketiga adalah **e-Berpadu** adalah sistem aplikasi digital terintegrasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung R.I untuk mendigitalisasi dan mempercepat proses administrasi perkara pidana antar lembaga penegak hukum mencakup pelimpahan berkas elektronik, permohonan izin/persetujuan (penahanan, penggeledahan, penyitaan, diversifikasi) serta layanan publik seperti izin besuk online.

1. Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan memonitor kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

SIPP Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Tahun 2025 sudah menggunakan versi terbaru yakni versi 6.0.1.



Gambar Tampilan SIPP Pengadilan Negeri Palangkaraya.

2. Implementasi e-court pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah satu dari satuan kerja yang ditunjuk sebagai pengadilan percontohan untuk e-litigasi yang merupakan kelanjutan dari e-court. E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

E-Court merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menerima 248 perkara perdata gugatan, 4 perkara Bantahan, 10 perkara perdata gugatan sederhana dan 146 perkara perdata permohonan.



Gambar Pojok E-Court Pengadilan Negeri Palangkaraya.



1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$ 5. $\frac{1}{6}$ 6. $\frac{1}{7}$ 7. $\frac{1}{8}$ 8. $\frac{1}{9}$ 9. $\frac{1}{10}$ 10. $\frac{1}{11}$ 11. $\frac{1}{12}$ 12. $\frac{1}{13}$ 13. $\frac{1}{14}$ 14. $\frac{1}{15}$ 15. $\frac{1}{16}$ 16. $\frac{1}{17}$ 17. $\frac{1}{18}$ 18. $\frac{1}{19}$ 19. $\frac{1}{20}$ 20. $\frac{1}{21}$ 21. $\frac{1}{22}$ 22. $\frac{1}{23}$ 23. $\frac{1}{24}$ 24. $\frac{1}{25}$ 25. $\frac{1}{26}$ 26. $\frac{1}{27}$ 27. $\frac{1}{28}$ 28. $\frac{1}{29}$ 29. $\frac{1}{30}$ 30. $\frac{1}{31}$ 31. $\frac{1}{32}$ 32. $\frac{1}{33}$ 33. $\frac{1}{34}$ 34. $\frac{1}{35}$ 35. $\frac{1}{36}$ 36. $\frac{1}{37}$ 37. $\frac{1}{38}$ 38. $\frac{1}{39}$ 39. $\frac{1}{40}$ 40. $\frac{1}{41}$ 41. $\frac{1}{42}$ 42. $\frac{1}{43}$ 43. $\frac{1}{44}$ 44. $\frac{1}{45}$ 45. $\frac{1}{46}$ 46. $\frac{1}{47}$ 47. $\frac{1}{48}$ 48. $\frac{1}{49}$ 49. $\frac{1}{50}$ 50. $\frac{1}{51}$ 51. $\frac{1}{52}$ 52. $\frac{1}{53}$ 53. $\frac{1}{54}$ 54. $\frac{1}{55}$ 55. $\frac{1}{56}$ 56. $\frac{1}{57}$ 57. $\frac{1}{58}$ 58. $\frac{1}{59}$ 59. $\frac{1}{60}$ 60. $\frac{1}{61}$ 61. $\frac{1}{62}$ 62. $\frac{1}{63}$ 63. $\frac{1}{64}$ 64. $\frac{1}{65}$ 65. $\frac{1}{66}$ 66. $\frac{1}{67}$ 67. $\frac{1}{68}$ 68. $\frac{1}{69}$ 69. $\frac{1}{70}$ 70. $\frac{1}{71}$ 71. $\frac{1}{72}$ 72. $\frac{1}{73}$ 73. $\frac{1}{74}$ 74. $\frac{1}{75}$ 75. $\frac{1}{76}$ 76. $\frac{1}{77}$ 77. $\frac{1}{78}$ 78. $\frac{1}{79}$ 79. $\frac{1}{80}$ 80. $\frac{1}{81}$ 81. $\frac{1}{82}$ 82. $\frac{1}{83}$ 83. $\frac{1}{84}$ 84. $\frac{1}{85}$ 85. $\frac{1}{86}$ 86. $\frac{1}{87}$ 87. $\frac{1}{88}$ 88. $\frac{1}{89}$ 89. $\frac{1}{90}$ 90. $\frac{1}{91}$ 91. $\frac{1}{92}$ 92. $\frac{1}{93}$ 93. $\frac{1}{94}$ 94. $\frac{1}{95}$ 95. $\frac{1}{96}$ 96. $\frac{1}{97}$ 97. $\frac{1}{98}$ 98. $\frac{1}{99}$ 99. $\frac{1}{100}$ 100. $\frac{1}{101}$ 101. $\frac{1}{102}$ 102. $\frac{1}{103}$ 103. $\frac{1}{104}$ 104. $\frac{1}{105}$ 105. $\frac{1}{106}$ 106. $\frac{1}{107}$ 107. $\frac{1}{108}$ 108. $\frac{1}{109}$ 109. $\frac{1}{110}$ 110. $\frac{1}{111}$ 111. $\frac{1}{112}$ 112. $\frac{1}{113}$ 113. $\frac{1}{114}$ 114. $\frac{1}{115}$ 115. $\frac{1}{116}$ 116. $\frac{1}{117}$ 117. $\frac{1}{118}$ 118. $\frac{1}{119}$ 119. $\frac{1}{120}$ 120. $\frac{1}{121}$ 121. $\frac{1}{122}$ 122. $\frac{1}{123}$ 123. $\frac{1}{124}$ 124. $\frac{1}{125}$ 125. $\frac{1}{126}$ 126. $\frac{1}{127}$ 127. $\frac{1}{128}$ 128. $\frac{1}{129}$ 129. $\frac{1}{130}$ 130. $\frac{1}{131}$ 131. $\frac{1}{132}$ 132. $\frac{1}{133}$ 133. $\frac{1}{134}$ 134. $\frac{1}{135}$ 135. $\frac{1}{136}$ 136. $\frac{1}{137}$ 137. $\frac{1}{138}$ 138. $\frac{1}{139}$ 139. $\frac{1}{140}$ 140. $\frac{1}{141}$ 141. $\frac{1}{142}$ 142. $\frac{1}{143}$ 143. $\frac{1}{144}$ 144. $\frac{1}{145}$ 145. $\frac{1}{146}$ 146. $\frac{1}{147}$ 147. $\frac{1}{148}$ 148. $\frac{1}{149}$ 149. $\frac{1}{150}$ 150. $\frac{1}{151}$ 151. $\frac{1}{152}$ 152. $\frac{1}{153}$ 153. $\frac{1}{154}$ 154. $\frac{1}{155}$ 155. $\frac{1}{156}$ 156. $\frac{1}{157}$ 157. $\frac{1}{158}$ 158. $\frac{1}{159}$ 159. $\frac{1}{160}$ 160. $\frac{1}{161}$ 161. $\frac{1}{162}$ 162. $\frac{1}{163}$ 163. $\frac{1}{164}$ 164. $\frac{1}{165}$ 165. $\frac{1}{166}$ 166. $\frac{1}{167}$ 167. $\frac{1}{168}$ 168. $\frac{1}{169}$ 169. $\frac{1}{170}$ 170. $\frac{1}{171}$ 171. $\frac{1}{172}$ 172. $\frac{1}{173}$ 173. $\frac{1}{174}$ 174. $\frac{1}{175}$ 175. $\frac{1}{176}$ 176. $\frac{1}{177}$ 177. $\frac{1}{178}$ 178. $\frac{1}{179}$ 179. $\frac{1}{180}$ 180. $\frac{1}{181}$ 181. $\frac{1}{182}$ 182. $\frac{1}{183}$ 183. $\frac{1}{184}$ 184. $\frac{1}{185}$ 185. $\frac{1}{186}$ 186. $\frac{1}{187}$ 187. $\frac{1}{188}$ 188. $\frac{1}{189}$ 189. $\frac{1}{190}$ 190. $\frac{1}{191}$ 191. $\frac{1}{192}$ 192. $\frac{1}{193}$ 193. $\frac{1}{194}$ 194. $\frac{1}{195}$ 195. $\frac{1}{196}$ 196. $\frac{1}{197}$ 197. $\frac{1}{198}$ 198. $\frac{1}{199}$ 199. $\frac{1}{200}$ 200. $\frac{1}{201}$ 201. $\frac{1}{202}$ 202. $\frac{1}{203}$ 203. $\frac{1}{204}$ 204. $\frac{1}{205}$ 205. $\frac{1}{206}$ 206. $\frac{1}{207}$ 207. $\frac{1}{208}$ 208. $\frac{1}{209}$ 209. $\frac{1}{210}$ 210. $\frac{1}{211}$ 211. $\frac{1}{212}$ 212. $\frac{1}{213}$ 213. $\frac{1}{214}$ 214. $\frac{1}{215}$ 215. $\frac{1}{216}$ 216. $\frac{1}{217}$ 217. $\frac{1}{218}$ 218. $\frac{1}{219}$ 219. $\frac{1}{220}$ 220. $\frac{1}{221}$ 221. $\frac{1}{222}$ 222. $\frac{1}{223}$ 223. $\frac{1}{224}$ 224. $\frac{1}{225}$ 225. $\frac{1}{226}$ 226. $\frac{1}{227}$ 227. $\frac{1}{228}$ 228. $\frac{1}{229}$ 229. $\frac{1}{230}$ 230. $\frac{1}{231}$ 231. $\frac{1}{232}$ 232. $\frac{1}{233}$ 233. $\frac{1}{234}$ 234. $\frac{1}{235}$ 235. $\frac{1}{236}$ 236. $\frac{1}{237}$ 237. $\frac{1}{238}$ 238. $\frac{1}{239}$ 239. $\frac{1}{240}$ 240.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:

1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:

1. Pelayanan administrasi persidangan;
2. Pelayanan bantuan hukum;
3. Pelayanan pengaduan;
4. Pelayanan permohonan informasi.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Palangkaraya merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengukuran indeks ini dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam meningkatkan mutu pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Palangkaraya pada Triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar 4.00/100% dan indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Triwulan IV tahun 2025 sebesar 4.00/100%. Hal ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian tersebut mencerminkan bahwa mayoritas pengguna layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, baik dari aspek prosedur pelayanan, kecepatan dan ketepatan layanan, profesionalisme aparatur pengadilan, kejelasan informasi, maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Hasil survei ini menunjukkan kesungguhan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam memberikan pelayanan yang prima, ramah, dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme aparatur. Pelayanan yang diberikan senantiasa berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan dan prinsip keterbukaan informasi publik.

Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Palangkaraya terus menjadikan hasil Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap masukan dan saran dari pengguna layanan akan ditindaklanjuti secara sistematis guna meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin meningkat.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 Tanggal 29 Januari 2024 Tentang Pembaharuan

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri pada ketentuan umum disebutkan bahwa:

1. **Pelayanan** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu**, yang selanjutnya disingkat **PTSP** adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
3. **Penyelenggara PTSP** adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
4. **Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** adalah Ketua Pengadilan Tinggi untuk PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk PTSP pada Pengadilan Negeri.
5. **Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
6. **Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan.
7. **Pengawas** adalah Hakim atau Pejabat yang ditunjuk oleh Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya layanan pada PTSP sehari - hari.
8. **Petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** adalah pegawai pada Kepaniteraan Muda Perdata/Pidana yang bertugas pada meja 1, Kepaniteraan Muda Hukum dan pada Bagian/Sub Bagian Umum dan

Keuangan untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsi masing – masing.

9. **Pengawasan** adalah proses monitoring terhadap kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam layanan di pengadilan.
10. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. **Disabilitas berhadapan dengan hukum** adalah penyandang disabilitas yang bertindak baik sebagai saksi atau korban atau terdakwa maupun pihak dalam perkara perdata.
12. **Penilaian personal** adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.
13. **Standar Layanan** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
14. **Maklumat Pelayanan** adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
15. **SK Kompensasi Pelayanan** adalah surat keputusan yang mengatur ketentuan dan tata cara pemberian kompensasi apabila pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan tidak sesuai standar.
16. **Front Office (Ruang Depan) PTSP** adalah ruangan untuk menerima

pendaftaran layanan dan verifikasi kelengkapan berkas layanan.

17. **Back Office (Ruang Belakang)** adalah ruangan untuk memproses berkas layanan sampai dengan tahap akhir menjadi produk layanan.

PTSP bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Aksesibilitas

Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Palangkaraya menerima surat masuk sebanyak 1.349 dan 3.023 surat keluar yang telah didokumentasikan secara elektronik melalui aplikasi PTSP, sehingga memudahkan dan mempercepat dalam tata persuratan.



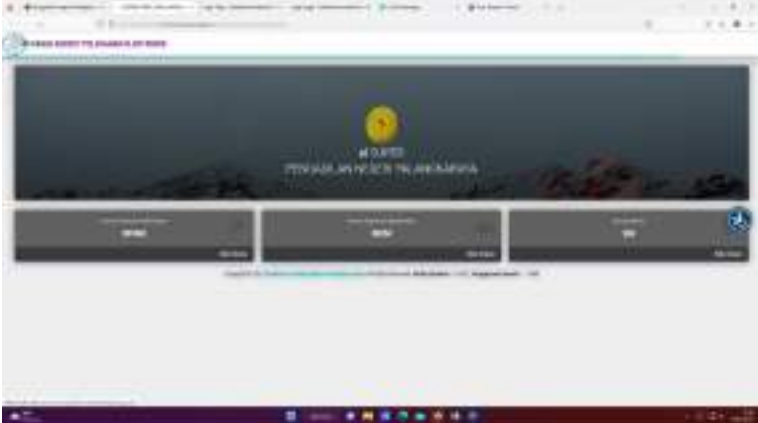
Gambar PTSP Pengadilan Negeri Palangkaraya.



Gambar Briefing petugas PTSP Pengadilan Negeri Palangkaraya.

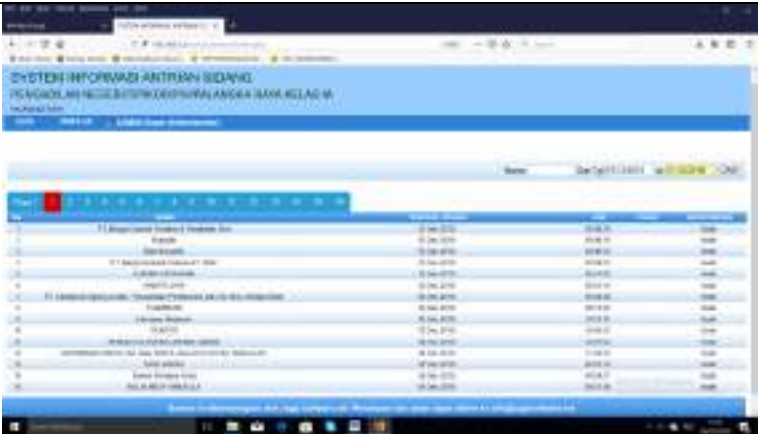
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Pengadilan Negeri Palangkaraya yaitu sebagai berikut:

No	Kategori	Jenis Inovasi	Penjelasan
1.	EKSTERNAL	MESIN ANTRIAN PTSP	 Adalah alat yang digunakan untuk antrian PTSP agar pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan cara melayani secara berurutan sesuai dengan kedatangan pengunjung.
2.	EKSTERNAL	APLIKASI SI SUPER	 Aplikasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan.

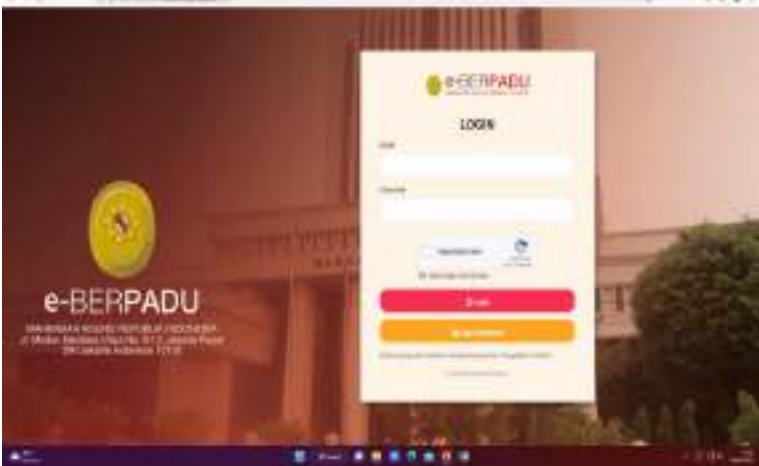
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

3.	EKSTERNAL	APLIKASI ANTRIAN SIDANG	 Adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan mendata dan memanggil para pihak yang hadir dan siap untuk disidangkan sesuai dengan antrian sidang.
4.	EKSTERNAL	MESIN ANTRIAN SIDANG	 Antrian Sidang Pengadilan merupakan aplikasi untuk manajemen

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

			antrian sidang di Pengadilan. Antrian Sidang Pengadilan secara otomatis terkoneksi dengan aplikasi manajemen perkara SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga menampilkan aplikasi antrian sidang secara otomatis dapat menampilkan jadwal sidang harian secara otomatis. Antrian Sidang Pengadilan tidak hanya menampilkan jadwal sidang secara otomatis, tetapi juga dapat memanggil panggilan persidangan dengan menyebutkan Nomor Perkara, Para Pihak, Agenda dan Jam Sidang secara otomatis dibunyikan saat ditekan tombol panggil. Antrian Sidang Pengadilan juga mampu menampilkan kehadiran pihak kepada Hakim dan Panitera Pengganti sehingga dapat diketahui, apakah pihak sudah hadir atau belum sehingga bisa diputuskan jika sudah waktunya jatuh tempo jam sidang sesuai jadwal sidang di SIPP dapat dipanggil atau tidak dengan diambil keputusan oleh Majelis Hakim setelah mengetahui kehadiran pihak. Antrian Sidang Pengadilan juga dapat memberikan pemberitahuan persidangan kepada para pihak 1 hari sebelum jatuh tempo hari sidang, atau secara otomatis dapat memberikan info kepada para pihak H-1 pengingat persidangan melalui pesan whatsapp. Antrian Sidang terintegrasi dengan asisten virtual dan mengirim pesan whatsapp secara otomatis untuk memberikan pemberitahuan persidangan dengan cara, para pihak harus bersedia atau langganan informasi persidangan pada aplikasi Antrian Sidang Pengadilan.
5.	EKSTERNAL	APLIKASI BERPADU E-	 Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2025

			Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
6.	EKSTERNAL	PTSP ONLINE	PTSP Online adalah Pelayanan Petugas Pelayanan Satu Pintu secara virtual yang terintegrasi dengan aplikasi Zoom Meeting dengan tautan yang tersedia. Layanan PTSP Online ini merupakan peningkatan layanan publik, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dan khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan informasi layanan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanpa harus datang ke pengadilan, dengan tautan : https://us05web.zoom.us/j/3382443701?pwd=MHITbTE2RUUp4RG1sMzNRYWVVFODI3QT09#success

7.		Mal Pelayanan Publik (MPP)	 Pengadilan Negeri Palangkaraya menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik dengan turut berpartisipasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
8.		Audio Anti Gratifikasi	 Aplikasi ini berfungsi untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada pengunjung bahwa Pengadilan Negeri Palangkaraya anti gratifikasi.

9.	EKSTERNAL	PENGADILAN INKLUSIF (PELAYANAN UNTUK DISABILITAS)	Kursi tunggu untuk penyandang Disabilitas pada ruang PTSP Kartu Prioritas Parkir Khusus Disabilitas
----	-----------	---	--



Tempat tunggu Disabilitas pada ruang PTSP



Ruang sidang inklusi

			 Toilet Disabilitas
--	--	--	---

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025



Buku Layanan Braille



Meja Layanan Kepaniteraan PHI



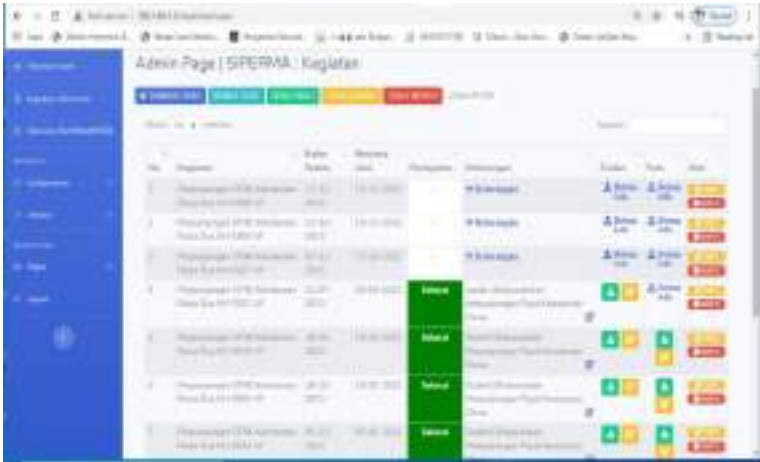
Meja Layanan Kepaniteraan Pidana

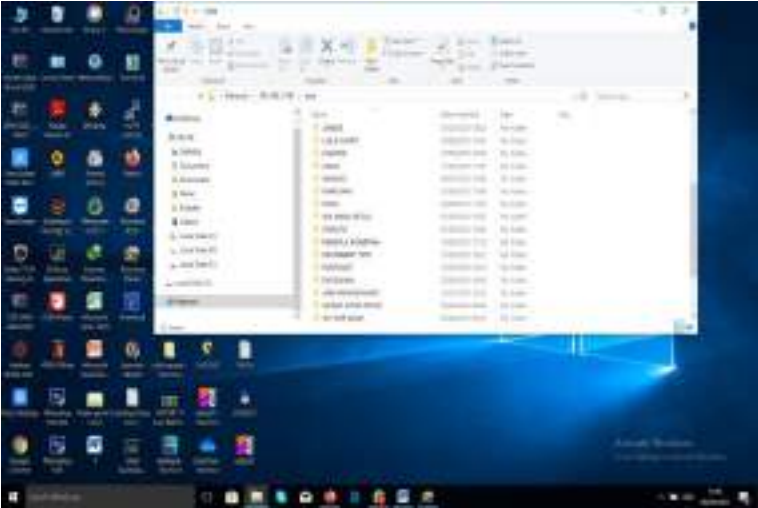
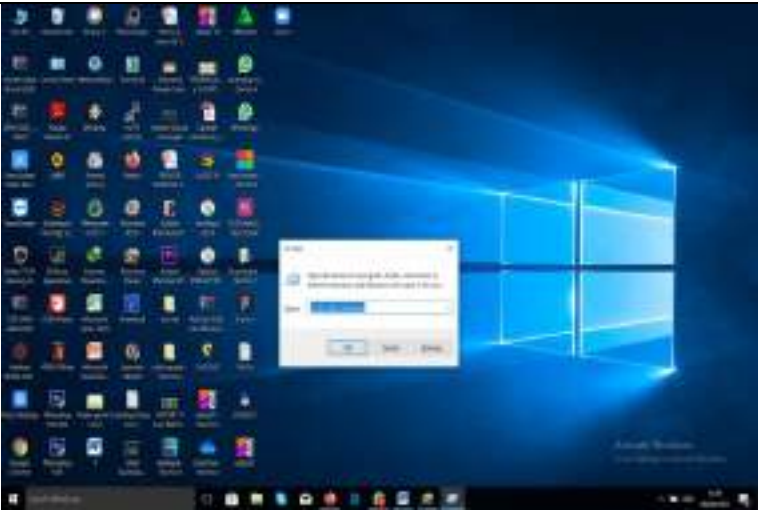
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

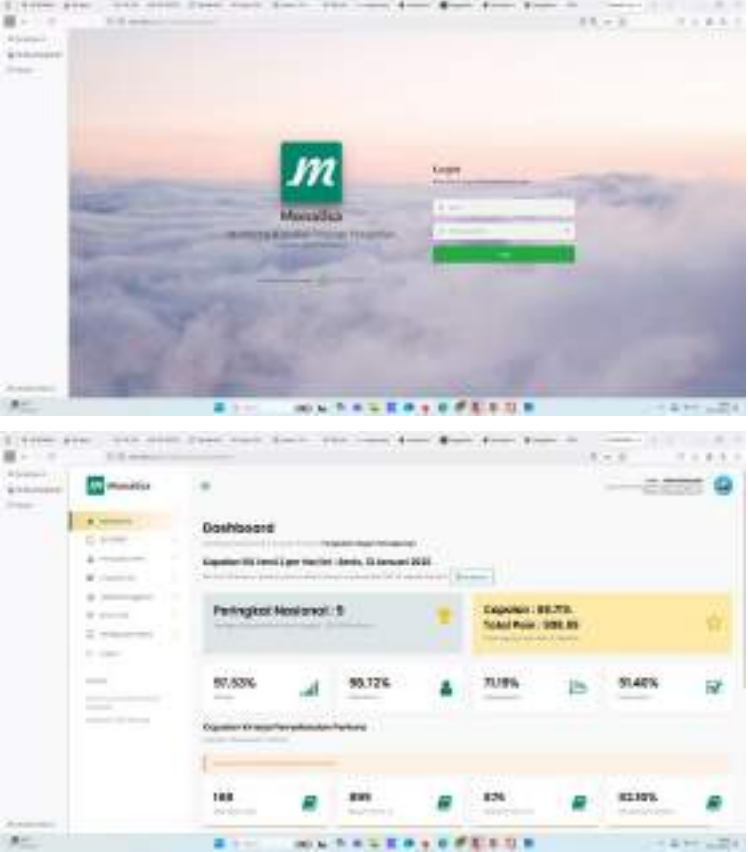
			
			Meja Layanan Umum
			
			Meja Layanan Kepaniteraan Perdata
			
			P Meja Layanan Kepaniteraan Hukum

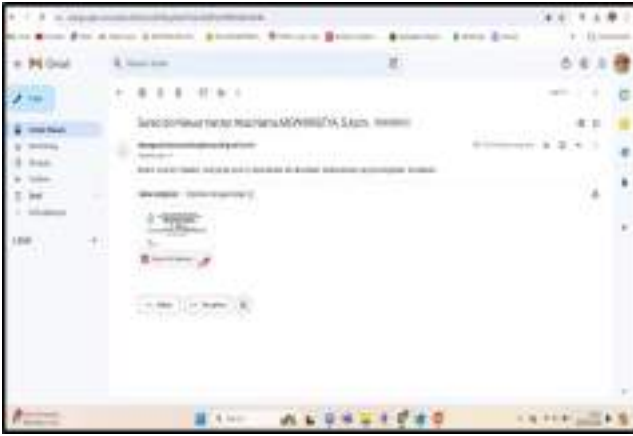
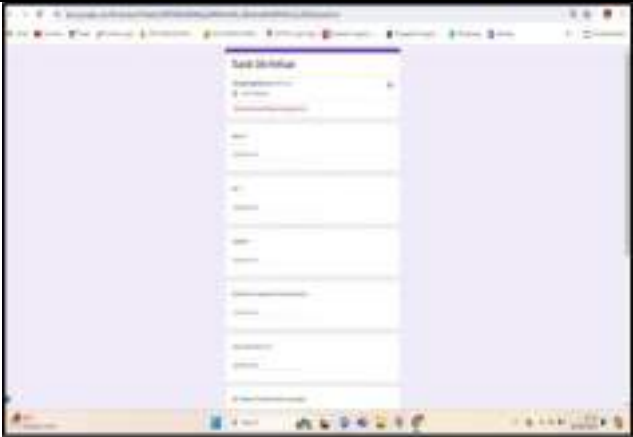
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

			 Meja Layanan Kepaniteraan Tipikor
10.		Aplikasi PIJAR	 Adalah Pelayanan Informasi Jarak Jauh yang terintegrasi dengan whatsapp dengan tautan yang tersedia di website Pengadilan Negeri Palangkaraya. Aplikasi pijar merupakan peningkatan layanan publik, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum dan khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan informasi layanan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.

11.	INTERNAL	APLIKASI SIPERMA	 The screenshot shows the 'Dokumen (Sertifikat BPKB)' section of the SIPERMA Admin Page. It features a table with columns for No., Jenis Dokumen, Nama Dokumen, Status, and Aksi. The table lists several documents, including 'Sertifikat BPKB' and 'Sertifikat BPKB', with their respective statuses and actions.  The screenshot shows the 'Kegiatan' section of the SIPERMA Admin Page. It features a table with columns for No., Kegiatan, Status, and Aksi. The table lists several activities, including 'Kegiatan SIPERMA' and 'Kegiatan SIPERMA', with their respective statuses and actions.  The screenshot shows the 'Selamat Datang' (Welcome) page of the SIPERMA Admin Page. It features a large banner with the text 'Selamat Datang MOVA IBRAHIM, SE, M.Si. Anda Login Sebagai: Kepala Sub Bagian Umum dan Kearsifan Satuan Kerja: Pengadilan Negeri Palangkaraya' and a colorful illustration of a city skyline.	Aplikasi ini diperuntukan untuk reminder kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan untuk penyimpanan dokumen softcopy dari sertifikat agar dapat memudahkan pencarian dokumen.
-----	----------	------------------	--	---

12.	INTERNAL	BANK DATA	 Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mendapatkan data melalui aplikasi secara langsung dengan mengakses dibank data melalui link \\192.168.1.100\data.
-----	----------	-----------	---

13.	INTERNAL	APLIKASI MONALISA	 MONALISA adalah Aplikasi Layanan Internal Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Pimpinan Pengadilan dalam memonitoring dan menganalisa kinerja pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan tautan : http://192.168.1.3/monalisa/index.php/auth Adapun fiturnya sebagai berikutnya : - EIS (SIPP) - Peringatan SIPP - Capaian IKU - Realisasi Anggaran - IKM dan IPAK - Konfigurasi Sistem
-----	----------	----------------------	---

14.	INTERNAL	Surat Ijin keluar kantor secara online	 Adalah surat izin keluar kantor secara online yang di isi melalui google form yang mana surat ijin keluar tersebut akan masuk ke email pegawai yang bersangkutan dan bisa langsung dicetak sesuai dengan format yang berlaku sehingga lebih efektif dan efisien.
-----	----------	--	--

15.		Permintaan ATK secara online	 yaitu Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam mengajukan permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) melalui barcode yang akan terhubung ke google form..
-----	--	------------------------------	--

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Adapun maksud, tujuan dan fungsi pengawasan berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 adalah sebagai berikut:

1. Maksud Pengawasan

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Pada dasarnya pengawasan internal dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pengawasan melekat telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Nomor: 117/KPN.W16-U1/SK/OT.1.2/XI/2025 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yaitu sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2025

Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya

NO	PENGAWAS BIDANG	NAMA HAKIM PENGAWAS	DIBANTU OLEH
1.	Koordinator Pengawasan	R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.	1. Panitera Muda 2. Panitera Pengganti 3. Tenaga Administrasi
2.	Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Perdata	Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.	1. Federius Halawa, S.H. 2. Agave Cristy J. Saragih
3.	Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Pidana dan Wasmat	Muhammad Affan, S.H., M.H.	1. Eventy Velly Palawa, S.H. 2. Kaspul
4.	Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Khusus PHI	Prapti Ramadhania, S.T., , S.H., M.H.	Berni Matheus Novrianus
5.	Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Khusus Tipikor	Muji Kartika Rahayu, S.H., M.Fil	1. Salundik, S.H. 2. Eska Juli Firnando, S.H.
6.	Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Hukum	1. Yunita, S.H. 2. Amir Mahmud Munthe, S.H.	Faustina Rahmasarita, A. Md., M.
7.	Pelayanan Administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1. Muhammad Rifa Rizah, S.H. 2. Fransisca Kiki Damyanti, S.H.	Mewikristya, S.Kom
8.	Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan	1. Liwar Ngguli Mbani Awang, S.H., M.H. 2. Dwi Harto Hanggono, S.H.	Hana Nisrina, S.T.

9.	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	1. Benyamin, S.H. 2. Iryana Margahayu, S.T., S.H.	Yoyo
10.	Pelayanan Satgas SIPP	1. Muhammad Affan, S.H., M.H. 2. Ni Made Kushandari, S.H., M.H.	Gilang Rahardian Saputra, S.H.
11.	Pelayanan Administrasi PTSP	1. Astiti Swanita Rini, S.H., M.H. 2. Abdur Rachman Iswanto, S.H., M.H.	Gustav Denovan

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya. Sedangkan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya dilakukan biasanya 2 (dua) kali dalam setahun.

b. *Pengawasan Fungsional*

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya secara rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui briefing atau rapat bulanan

yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Dari Evaluasi Pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada. Sehingga pekerjaan dapat dikerjakan tepat waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat para pencari keadilan.
2. Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan, namun setidaknya upaya ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palangkaraya.
3. Menganalisis Kinerja Pengadilan Negeri Palangkaraya merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Palangkaraya dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.
4. Bagi Pengadilan Negeri Palangkaraya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.

B. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pencapaian target pelayanan publik yang prima dan berbasis IT (Informasi Teknologi).
3. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun pelaksana pada bagian kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini jumlahnya masih terbatas.